

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG GOR CENDRAWASIH JAYAPURA DALAM PANTAUAN POLDA PAPUA

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON TRAFFIC VIOLATIONS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT AT THE PEOPLE'S CROSSING BRIDGE AT THE CENDRAWASIH GOR JAYAPURA UNDER THE MONITORING OF THE PAPUA REGIONAL POLICE

Shifha Rizky R. Keya¹, Ahmad Rifai Rahawarin², Muhammad Amin Hamid³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: shifakya@gmail.com**

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) on the Pedestrian Bridge (JPO) of the Cendrawasih Sports Hall in Jayapura and to identify factors that influence traffic violation law enforcement. The research is motivated by the increasing number of traffic violations and the need for a transparent and accountable law enforcement system. The research method used is empirical research supported by normative data through field studies and literature studies, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of ETLE has a positive impact on increasing driver compliance through automatic and real-time recording of violations. However, the effectiveness of ETLE is still influenced by limited infrastructure, the quality of law enforcement officers, low public legal awareness, and a lack of socialization. Therefore, technological improvements, public education, and strengthening the capacity of officers are needed to optimize the implementation of ETLE in Jayapura City.

Keywords: ETLE, Law Enforcement, Traffic Violations, Cendrawasih Sports Hall, Jayapura City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) GOR Cendrawasih Jayapura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan dukungan data normatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pengendara melalui perekaman pelanggaran secara otomatis dan real-time. Namun, efektivitas ETLE masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana-prasarana, kualitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan teknologi, edukasi masyarakat, dan penguatan kapasitas aparat guna mengoptimalkan penerapan ETLE di Kota Jayapura.

Kata kunci: ETLE, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, GOR Cendrawasih, Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas, salah satunya melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ini memanfaatkan kamera dan teknologi informasi untuk merekam pelanggaran secara otomatis, sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum, serta mengurangi praktik penyimpangan dalam tilang konvensional.

Namun, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah, yang tercermin dari tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Secara normatif, penerapan ETLE telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengakui penggunaan alat elektronik sebagai alat bukti. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ETLE mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi penindakan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan, seperti belum optimalnya infrastruktur, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta belum meratanya efektivitas implementasi di berbagai daerah.

Permasalahan tersebut juga terlihat di Kota Jayapura, khususnya di kawasan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) GOR Cendrawasih, yang masih menjadi titik rawan pelanggaran lalu lintas meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan ETLE dalam mengubah perilaku masyarakat dan menekan angka pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui penerapan ETLE di JPO GOR Cendrawasih Jayapura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian dilakukan di JPO GOR Cendrawasih dan Satlantas Polda Papua, Kota Jayapura. Data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi kepustakaan terhadap peraturan dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan temuan penelitian dalam menilai efektivitas penerapan ETLE.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan ETLE di Gor Cendrawasih Jayapura

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di JPO GOR Cendrawasih Jayapura menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas, terutama terkait penggunaan helm, seat belt, kepatuhan rambu, serta pengurangan penggunaan telepon saat berkendara. Sistem ETLE juga terbukti meningkatkan transparansi dan mempercepat proses penindakan pelanggaran, karena secara substantif telah diatur mengenai penerapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas.

Namun, efektivitas penerapan ETLE belum optimal. Kerusakan kamera akibat tindakan perusakan menyebabkan sistem tidak berfungsi secara berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ETLE, serta kendala infrastruktur dan teknis, termasuk keterbatasan tenaga teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE memiliki efektivitas pada aspek penindakan dan transparansi, namun belum mampu secara konsisten mengubah perilaku

berlalu lintas. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada faktor eksternal seperti kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan terhadap infrastruktur.

Kerusakan perangkat ETLE menjadi indikator penting bahwa keberlanjutan sistem masih rentan terhadap gangguan non-teknis. Di sisi lain, rendahnya literasi masyarakat terkait ETLE menunjukkan perlunya penguatan strategi sosialisasi sebagai bagian dari pendekatan preventif. Dengan demikian, optimalisasi ETLE memerlukan integrasi antara kesiapan teknologi, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat agar tujuan penegakan hukum lalu lintas dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di GOR Cendrawasih Jayapura dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) substansi hukum yang sudah memadai dan memiliki legitimasi kuat; (2) sumber daya manusia aparat yang mendukung pelaksanaan, namun masih perlu optimalisasi; (3) sarana dan prasarana yang menjadi kendala utama akibat kerusakan kamera, keterbatasan jaringan, dan teknis; (4) kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah; serta (5) budaya hukum, khususnya terkait konsistensi penegakan sanksi.

Temuan menunjukkan bahwa efektivitas ETLE bergantung pada keterpaduan antara aspek hukum, teknis, dan sosial. Kendala utama terletak pada infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya perlindungan sarana, yang menghambat keberlanjutan sistem. Selain itu, rendahnya pemahaman dan budaya hukum masyarakat menunjukkan pentingnya penguatan edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, optimalisasi ETLE memerlukan perbaikan sarana, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penegakan hukum guna mendukung efektivitas yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di GOR Cendrawasih Jayapura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE telah berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi penegakan hukum dan mendorong kepatuhan sebagian masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem.

Namun, efektivitas ETLE belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan teknis, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ETLE tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan faktor sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai penegakan hukum berbasis teknologi, khususnya dengan menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi antara aspek teknis, kelembagaan, dan sosial. Optimalisasi ETLE melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang,” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2 (September 2022) : 3004
- Muhammad Yusril Halid. 2024. Tilang Elektronik (E-Tle) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. 13 (5)
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan